

**GOVERNMENT CAPACITY DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DALAM PENURUNAN *STUNTING***

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Menyelesaikan Program S-1
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh:

**YULIA FITRI
19042206**

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

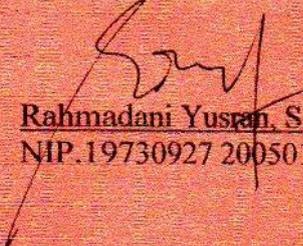
PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Government Capacity Daerah Kabupaten Solok Selatan Dalam
Penurunan Stunting
Nama : Yulia Fitri
TM/NIM : 2019/19042206
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 22 Agustus 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing,


Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si
NIP.19730927 200501 1 004

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Pada hari Jumat, 18 Agustus 2023 Pukul 09.30 WIB s/d 10.30 WIB

Government Capacity Daerah Kabupaten Solok Selatan Dalam Penurunan Stunting

Nama : Yulia Fitri
TM/NIM : 2019/19042206
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

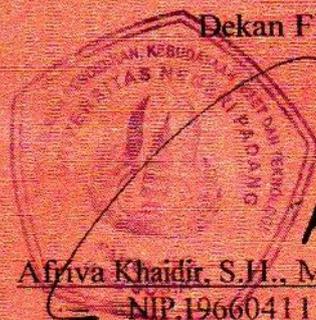
Padang, 22 Agustus 2023

Tim Penguji :

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si	1.
Anggota : Dr. Siska Sasmita, S.IP., MPA	2.
Anggota : Iip Permana, S.T., M.T	3.

Mengesahkan

Dekan FIS UNP


Afriya Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D
NIP.19660411 1990031 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulia Fitri
NIM/BP : 19042206/2019
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “*Government Capacity* Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Dalam Penurunan Stunting” adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Yulia Fitri
1904206

ABSTRAK

YULIA FITRI 19042206 *Government Capacity Daerah Kabupaten Solok Selatan Dalam Penurunan Stunting*

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana *Government Capacity* Daerah Kabupaten Solok Selatan Dalam Penurunan *Stunting* dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat *Government Capacity* Daerah Kabupaten Solok Selatan Dalam Penurunan *Stunting*. Angka *stunting* di Indonesia menurut Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan sekitar 7 juta (30,8%) balita menderita *stunting* (Kesehatan, 2018). Pada tahun 2021 Kabupaten Solok Selatan mengalami prevalensi *stunting* sebesar 30% dan merupakan daerah peringkat 3 terbesar *stunting* di Sumatera Barat (Kemenkes, 2023). Hal ini membuktikan pemerintah daerah belum mampu menurunkan prevalensi *stunting*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Untuk itu, dilakukan wawancara dengan sejumlah informan, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, DP2KB PP & PA, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Diskominfo, Kemenag, dan Baznas; yang diiringi pula dengan dokumentasi yang berkaitan dengan *government Capacity* Daerah Kabupaten Solok Selatan Dalam Penurunan *Stunting*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya *government capacity* daerah Kabupaten Solok Selatan dalam penurunan *stunting* belum optimal dilakukan, hal ini disebabkan karena anggaran yang tidak mencukupi untuk penurunan *stunting*, belum mampu mengkoordinasi OPD-OPD untuk melaksanakan program, pelaksanaan program yang belum sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, kurangnya pelatihan untuk kader-kader posyandu, penolakan imunisasi dari masyarakat, anak yang diimunisasi demam atau batuk pilek serta masalah petugas kesehatan yang terbatas untuk melaksanakan program. Untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dengan mengukur kapasitas yang dikemukakan oleh Polidano dalam Nugroho (2014), yaitu *policy capacity*, *implementation authority*, dan *operational efficiency*.

Kata Kunci : *Government Capacity, Kabupaten Solok Selatan, Stunting*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena rahmat, karunia dan segala nikmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "***Government Capacity Daerah Kabupaten Solok Selatan Dalam Penurunan Stunting***". Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S1) Pada Jurusan Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Terwujudnya penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing, serta meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani., M.Si selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama memberikan bimbingan,

arahan serta saran yang membangun kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Bapak Hidayatul Fajri, S.AP.,MPA selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Siska Sasmita, S.IP., MPA selaku Dosen Penguji pertama yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Bapak Iip Permana, ST.,MT selaku Dosen Penguji kedua yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
9. Bapak Prof. Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Bapak dan Ibu Dosen Staff Pengajar Departemen Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis serta memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis.
11. Staff karyawan, karyawan keputakaan dan staff administrasi Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
12. Bapak/Ibu lainnya yang menjadi informan dalam penelitian yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian data skripsi ini.
13. Teristimewa untuk kedua orang tua Bapak Zainal dan Ibu Yusneli, serta Abang, Kakak dan Adek yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

14. Sahabatku Aulia, Mesi, Fani, Apin, dan Yuli yang selalu memberikan dukungan dalam menulis skripsi ini.
15. Seluruh rekan-rekan Departemen Ilmu Administrasi Negara angkatan 19 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang telah dibangun bersama.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan yang penulis tidak sadari. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak atau pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 7 Juli 2023

Yulia Fitri
19042206

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kajian Teori	13
1. Konsep <i>Government Capacity</i>	13
2. Konsep <i>Stunting</i>	18
B. Penelitian Yang Relevan	25
C. Kerangka Konseptual	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Fokus Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	32
D. Informan Penelitian	32
E. Jenis, Sumber, Teknik, Alat Pengumpulan Data	33
F. Teknik dan Pengumpulan Data	35
G. Uji Keabsahan Data	36
H. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Temuan Umum	40
1. Gambaran Umum Kabupaten Solok Selatan	40
2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan..	52
3. Kondisi Stunting Kabupaten Solok Selatan	53
B. Temuan Khusus	54
1. <i>Government Capacity</i> Dalam Penurunan Stunting Di Kabupaten Solok Selatan	54
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat <i>Government Capacity</i> Daerah Dalam Penurunn Stunting Di Kabupaten Solok Selatan .	83
C. Pembahasan	93

BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	109

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Tabel Perbandingan Luas Kecamatan Di Kabupaten Solok Selatan	33
Tabel 4. 2 Tabel Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Solok Selatan 2016-2020	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Stunting merupakan masalah gizi yang menjadi prioritas di Indonesia. *stunting* disebabkan oleh asupan gizi yang dikonsumsi selama masa kandungan dan masa belita, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Menurut World Organization Health (WHO), *stunting* adalah suatu kondisi gagal tumbuh kembang pada anak akibat infeksi berulang dan kurangnya gizi pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dalam hidup seorang anak yang didasarkan pada panjang badan dibanding umur atau tinggi badan dibanding umur dengan batas z-score -2 standar deviasi.

Prevalensi *stunting* di Indonesia menurut hasil riset oleh Kemenkes melalui hasil Kesehatan Dasar (Riskandes) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa penurunan prevalensi *stunting* belita tingkat nasional sebesar 6,4% selama periode 5 tahun, yaitu mulai tahun 2013 sampai 2018. Dalam hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2013 sekitar 37,2% belita yang menderita *stunting*, sedangkan tahun 2018 terjadi penurunan sehingga yang menderita *stunting* berada pada angka 30,8% pada bayi belita.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terdapat pada pasal 1 bahwa percepatan penurunan *stunting* dilakukan dengan upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif secara konvergen, holistik, integratif,

dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Strategi nasional percepatan penurunan *stunting* dilakukan dengan langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk percepatan penurunan *stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dari strategi nasional percepatan penurunan *stunting* untuk:

- 1) Menurunkan prevalensi *stunting*;
- 2) Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- 3) Menjamin pemenuhan asupan gizi;
- 4) Memperbaiki pola asuh;
- 5) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- 6) Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Namun demikian, implementasi kebijakan pencegahan penurunan *stunting* ini belum berhasil dalam mencegah prevalensi *stunting*. Misalnya Kabupaten Lombok Timur pemerintah daerah belum berhasil mencegah prevalensi *stunting*, hal ini dikarenakan adanya faktor penghambat yang mencakup sumber daya, disposisi, komunikasi, kapasitas kebijakan dalam membangun proses implementasi, dan lingkungan (Putri Wididiati, et al, 2022). Di Kabupaten Malang pemerintah daerah juga belum berhasil mencegah prevalensi *stunting* dikarenakan kurangnya sinergitas program antar OPD dan kurang pelibatan unsur diluar pemerintahan yang dapat menjadi mitra program (Hutri Agustino & Eko Rizqi Purwo Widodo, 2022). Selain itu, di Kabupaten Karawang pemerintah daerah belum berhasil melakukan penanganan *stunting* yang disebabkan karena belum

terlaksananya program-program pencegahan *stunting* dan memberikan efek dampak langsung kepada masyarakat Kabupaten Karawang (Qotrun Nada Sahroji, et al, 2022). Fenomena ini membuktikan bahwa pemerintah daerah di Indonesia belum berhasil dalam melakukan masalah *stunting* dikarenakan masih tinggi angka *stunting*.

Angka *stunting* masih cukup tinggi terjadi di Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa jumlah *stunting* mencapai 27, 67% dan Sumatera Barat menduduki peringkat 3 di Sumatera melebihi daerah tetangga yaitu Bengkulu dan Jambi (sumbarprov.go.id, 2021). Namun demikian, implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan *stunting* ini belum berhasil dalam mencegah prevalensi *stunting*. Belum berhasil dalam mencegah prevalensi *stunting* terjadi di Kota Padang yang disebabkan karena belum optimalnya koordinasi pemangku kepentingan, terbatasnya sosialisasi tentang gizi, tumpang tindihnya program prioritas yang dilaksanakan, koordinasi antar lintas sektor organisasi pemerintah belum didukung dengan regulasi khusus daerah dan adanya tenaga kesehatan/tenaga edukasi belum memiliki pemahaman yang cukup tentang gizi yang baik (Febby Febrian & Rahmadani Yusran, 2021). Selain itu, jumlah *stunting* masih cukup tinggi yang terjadi di Pasaman Barat, pemerintah daerah juga belum berhasil mencegah prevalensi *stunting*, hal ini berhubungan dengan intervensi spesifik dan sensitive yang belum merata dilakukan (Gusmiyati & Rahmadani Yusran, 2022). kemudian, di Kabupaten Pesisir Selatan pemerintah daerah belum berhasil melakukan upaya pencegahan *stunting*. Hal ini dikarenakan kegiatan posyandu

tidak rutin dilaksanakan, kegiatan PMT masih terbatas, dan rumah desa sehat belum dapat dijalankan (Sentia Indah dan Rahmadani Yusran 2022).

Kabupaten Solok Selatan saat ini berada pada posisi ke-4 di Provinsi Sumatera Barat dengan kasus penderitaan *stunting* terbanyak setelah kepulauan Mentawai, Pasaman, dan Kabupaten Solok (Kemenkes, 2019). Berdasarkan indeks TB/U terhadap Kabupaten Solok Selatan tahun 2020 tercatat angka tertinggi penderitaan *stunting* yaitu 13,7% lebih tinggi dari pada tahun 2019 yaitu 8,7%. Hal ini perlu perhatian yang mendalam terhadap penurunan *stunting*. Menanggulangi masalah *stunting* perlu tindakan yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan intervensi gizi. Sebagai bentuk dukungan dari daerah, seharusnya ada peraturan yang mengatur lebih mendalam mengenai pembangunan jangka menengah nasional termasuk didalamnya program khusus untuk dapat mengatasi *stunting* yang terjadi. Dalam proses penanganan *stunting* pemerintah perlu bekerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat. Kerjasama atau kolaborasi dilakukan untuk dapat memastikan penanganan dan pencegahan *stunting* dapat berjalan sesuai target yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa pemerintah daerah belum berhasil dalam menurunkan prevalensi *stunting*.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan prevalensi *stunting* berkaitan erat dengan kapasitas pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kapasitas pemerintahan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Menurut Besley & Persson (2011:6) dalam Leo Augustino, dkk (2021) menyatakan bahwa, “kapasitas kelembagaan pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang memberikan manfaat dan pelayanan kepada masyarakat dan perusahaan”. Kaufmann, dkk (2015:4) mendefinisikannya sebagai, “kapasitas pemerintah untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan yang baik secara efektif”. Centeno et al (2017:3) memahaminya sebagai, "kemampuan organisasi dan birokrasi untuk melaksanakan proyek pemerintah". Menurut Grindle (1997:23) menyebutkan *capacity building* merupakan upaya yang ditunjukkan untuk mengembangkan suatu strategi guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsivitas kinerja pemerintah.

Merujuk pada data Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan, kasus *stunting* saat ini masih mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, dilihat dari tahun 2018 sebesar 16,45%. Tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 8,7%. Sedangkan pada tahun 2020 kasus *stunting* mengalami kenaikan lagi sebesar 13,7% dan tahun 2021 sebesar 6,09%. Namun, berbeda dengan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi kasus *stunting* di Kabupaten Solok Selatan mengalami kenaikan sekitar 24,5% melebihi target yang ditetapkan pemerintah melalui Perpres Nomor 72 tahun 2021 (antaranew, 2022). Ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan gizi buruk selama ini belum berhasil dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan. Permasalahan ini juga didukung oleh kajian yang dilakukan Febrian dan Yusran, yang mengatakan bahwa koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan *stunting* belum optimal dilakukan. Berdasarkan fenomena

ini jelas terlihat bahwa *government capacity* daerah belum berhasil menurunkan prevalensi *stunting*.

Berdasarkan hasil wawancara survey awal dari narasumber Primadona, SIP selaku bidang P3M Dinas Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Solok Selatan, dalam penurunan *stunting* Kabupaten Solok Selatan setiap tahunnya mengalami peringatan yang disebabkan prevalensi kenaikan *stunting* yang terus meningkat, dimana posisi peringkat dalam percepatan penurunan *stunting* Kabupaten Solok Selatan terus menurun sehingga Kabupaten Solok Selatan berada pada zona merah tingginya masyarakat yang terdampak *stunting*. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus berupaya untuk dapat melakukan kegiatan percepatan penurunan *stunting*. Selain itu, Primadona selaku bidang P3M Bappeda Kabupaten Solok Selatan juga mengatakan bahwa:

“...pemerintah Kabupaten Solok Selatan melakukan kegiatan percepatan penurunan stunting dengan membentuk terlebih dahulu Tim Penanganan Stunting (TPS) sebagai pihak yang akan bertanggung jawab dalam percepatan penurunan stunting di Daerah. Tim Penanganan Stunting dibentuk dan Bappeda sebagai koordinator penanganan stunting, kemudian yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting yaitu Dinas Kesehatan, Dinas P2KBPP & PA, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial PMD, Dinas Pekerjaan Umum”.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terdapat pada pasal 13 ayat (1) disebutkan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Desa dapat melibatkan lembaga Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Desa terkait dan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan

percepatan penurunan *stunting*. Keterlibatan seluruh stakeholders dan para pemangku kepentingan ini dilakukan secara konvergen dan terintegritas, artinya penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi dan bersama-sama untuk mencegah *stunting* kepada sasaran prioritas. Dari peraturan presiden yang telah dijelaskan berarti adanya penekanan untuk penurunan *stunting* di Indonesia, namun dalam penerapannya masih belum optimal dilakukan. Sehingga berdampak pada angka prevalensi *stunting* di kabupaten Solok Selatan yang fluktuatif dari tahun ke tahun.

Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan telah melaksanakan kebijakan penurunan *stunting* dan sampai saat ini jumlah prevalensi *stunting* masih tinggi. Saat ini prevalensi sebesar 30% dan merupakan daerah peringkat 3 terbesar *stunting* di Sumatera Barat (Kemenkes, 2023). Hal ini membuktikan pemerintah daerah belum mampu menurunkan prevalensi *stunting*. secara teoritis kapasitas pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak (L Fariz Gifary, 2018). Namun, secara praktis belum berhasil melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama dalam penurunan *stunting* di Kabupaten Solok Selatan masih dilakukan kerjasama lintas sektor pemerintahan daerah dan kerjasama tersebut belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permasalahan ini dikemukakan oleh Primadona selaku bidang P3M Bappeda Kabupaten Solok Selatan. Menurut Primadona:

“...dalam kasus stunting di Kabupaten Solok Selatan belum berhasil mencegah stunting yang disebabkan kerjasama untuk melakukan program-program stunting belum optimal dilakukan oleh OPD-OPD terkait pencegahan stunting, meskipun sudah dibentuknya tim percepatan penurunan stunting dan dalam pencegahan stunting belum ada kerjasama dengan pihak diluar pemerintahan”

Kedua, secara teoritis kapasitas pemerintah juga terfokus kepada anggaran. Berdasarkan Peraturan Presiden No.52 Tahun 2012 tentang kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan daerah Pasal 20 ayat 2 bahwa program dan kegiatan pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran dan pendapatan belanja pemerintah daerah masing- masing (Tuti Erawaty, 2018). Sedangkan secara praktis, pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan dalam penyediaan anggaran penurunan *stunting* belum mampu menyediakan anggaran penurunan *stunting*. Hal ini terlihat dari belum tersedianya anggaran yang jelas di masing- masing OPD. Anggaran yang digunakan untuk melakukan penurunan *stunting* adalah setiap OPD-OPD memperkirakan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan penurunan dan penanganan *stunting*, sehingga anggaran untuk *stunting* sangat terbatas dan pencairan anggaran juga lambat. Permasalahan ini dikemukakan oleh Primadona selaku bidang P3M Bappeda Kabupaten Solok Selatan. Menurut Primadona:

“...anggaran untuk percepatan penurunan stunting masih sangat terbatas dari anggaran APBD Kabupaten Solok Selatan dan pencairan anggaran juga lambat untuk melaksanakan program pencegahan stunting yang akan dilakukan setiap OPD”.

Berdasarkan data anggaran *stunting* dari Dinas Bappeda Kabupaten Solok Selatan tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp. 3.775.149.298. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan yang dilakukan oleh 3 (tiga) OPD, yaitu Dinas Kesehatan Dinas P2KBPP&PA dan Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan. Anggaran tersebut dilakukan untuk melakukan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung penurunan *stunting*. Pada tahun 2022

hasil rekapitulasi anggaran yang telah dikeluarkan untuk penurunan *stunting* oleh 6 (enam) OPD sebesar Rp. 16.984.496.457 (Rekap Anggaran Kegiatan *Stunting* Bappeda Solok Selatan 2021-2022). Anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan untuk penurunan *stunting*. Setiap OPD-OPD yang bertanggungjawab memberikan kebutuhan kepada penderita *stunting*, namun tidak dilakukan secara menyeluruh sekedar memberikan apa yang sangat dibutuhkan saja. Oleh karena itu, anggaran yang ada belum terealisasikan sesuai dengan kebutuhan. Permasalahan ini dikemukakan oleh Primadona selaku bidang P3M Bappeda Kabupaten Solok Selatan. Menurut Primadona:

“...dalam penurunan stunting setiap OPD bertanggungjawab memberikan kebutuhan yang diperlukan kepada masyarakat yang terdampak stunting. Namun, pemberian kebutuhan dilihat dari apa yang paling dibutuhkan terlebih dahulu untuk memenuhi asupan gizi bagi masyarakat yang terdampak stunting. Misalnya pemberian sembako berupa beras, telur dan vitamin-vitamin untuk memenuhi asupan gizi”.

Ketiga, secara teoritis dalam pengembangan kapasitas pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden No.52 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa membangun komitmen seluruh penyelenggara pemerintahan daerah untuk melaksanakan kebijakan daerah yang telah ditetapkan. Namun secara praktis di Kabupaten Solok Selatan seluruh penyelenggara pemerintahan daerah memiliki komitmen yang masih rendah dalam penurunan *stunting*. Permasalahan ini dikemukakan oleh Primadona selaku bidang P3M Bappeda Kabupaten Solok Selatan. Menurut Primadona:

“...dalam penurunan stunting komitmen OPD-OPD di Kabupaten Solok masih rendah karna masing-masing OPD masih belum paham dengan

stunting, sehingga komitmen masing-masing OPD masih dalam tahap transisi atau baru mulai untuk bergerak”.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul yaitu ***Government Capacity Daerah Dalam Penurunan Stunting Di Kabupaten Solok Selatan.***

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian yaitu :

1. *Government Capacity* dalam melakukan kerjasama lintas sektor pemerintahan daerah belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. *Government capacity* dalam penyediaan anggaran belum mampu menyediakan anggaran penurunann *stunting* sesuai dengan kebutuhan.
3. *Government capacity* daerah Kabupaten Solok Selatan masih rendahnya komitmen dalam penurunan *stunting*.

C. BATASAN MASALAH

Dari identifikasi masalah yang dipaparkan di atas dimensi permasalahan yang sangat luas. Namun, peneliti memberikan batasan masalah secara terfokus dan jelas yaitu a) *Government Capacity* dalam melakukan kerjasama lintas sektor pemerintahan daerah belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku. b) *Government capacity* dalam penyediaan anggaran belum mampu menyediakan anggaran penurunan *stunting* sesuai dengan kebutuhan.

D. RUMUSAN MASALAH

Dari batasan masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *government capacity* dalam penurunan *stunting* di Kabupaten Solok Selatan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat *government capacity* dalam penurunan *stunting* di Kabupaten Solok Selatan?

E. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan *government capacity* dalam penurunan *stunting* di Kabupaten Solok Selatan.
3. menjelaskan faktor pendukung dan penghambat *government capacity* daerah dalam penurunan *stunting* di Kabupaten Solok Selatan?

F. MANFAAT PENELITIAN

Dari tujuan masalah di atas, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu administrasi negara khususnya berkaitan dengan kebijakan publik, Pemerintah daerah dan implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memecahkan permasalahan pemerintahan daerah dalam menyelesaikan masalah kebijakan, terutama *government capacity* dalam penurunan *stunting*.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan rujukan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.